

Keadilan Sosial dan Sastra

KOMPAS
30 Maret 1983
Halaman IV

Oleh Ariel Heryanto

ADA ironi pahit pada soal yang paling mendasar dalam kehidupan sosial sastra Indonesia saat ini. Sastra Indonesia dibentuk dan sekaligus membentuk ketidakadilan sosial. Hal ini tidak terlepas dalam pengamatan banyak pihak. Lebih parah lagi, banyak pendukung keadilan sosial maupun 'sastra' Indonesia justru menyerahkan kepercayaan, kehormatan, harapan, dan dana bagi 'sastra' agar 'sastra' menjadi pahlawan pembasmi ketidakadilan.

Tulisan ini merupakan upaya ringkas dan sederhana untuk menunjuk beberapa persoalan yang menghasilkan ironi di atas. Karena dibuat ringkas mungkin, padahal masalah bahasan cukup rumit, tulisan ini bersifat sangat umum. Berbagai data terperinci terpaksa disisihkan.

Perceraian

Hingga kini sebagian besar pembahasan para pemikir sastra Indonesia tentang hubungan 'sastra' dan 'masyarakat' terpesosok pada tiga hal utama. Pertama, perlu tidaknya 'sastra' berurusan dengan soal 'kemasyarakatan'. Kedua, mampu tidaknya 'sastra' menjadi salah satu faktor penentu perubahan 'sosial'. Ketiga, sudah dan mau tidaknya sastrawan Indonesia mutakhir mengabdikan karyanya bagi perjuangan keadilan sosial.

Bagi saya masalah utama dalam telaah sastra Indonesia belakangan ini tidak terletak pada 'kekeliruan' menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tetapi pada tingkat yang lebih awal dan mendasar: 'kekeliruan' mengajukan dan merumuskan pertanyaan pokok.

Terhadap ketiga soal utama di atas, para pemikir sastra kita telah berupaya sebaik-baiknya mengajukan berbagai gagasan. Kadangkala terdapat perbedaan, tak jarang pertentangan gagasan di antara mereka. Tapi di balik perbedaan dan pertentangan menyolok itu, terdapat tiga hal yang cukup seragam dan mendasar sifatnya.

Pertama, mereka menerima anggapan bahwa 'sastra' kita tercerai dari 'masyarakat'. Di atas anggapan dasar ini, timbul perdebatan tentang sebab dan akibat perceraian tersebut.

Kedua, mereka sepakat memandang 'sastra' sebagai sesuatu yang 'mulia' dan perlu dimuliakan. Di atas pandangan dasar ini, timbul perdebatan tentang perlu atau mampu dan tidaknya 'sastra' mengorbankan kemuliaannya untuk berkecimpung dalam masalah-masalah 'masyarakat' yang penuh lumpur (kotornya politik, rakusnya ekonomi, tidak manusiawinya teknologi).

Ketiga, mereka sama-sama menerima pandangan adanya 'sastra' yang 'benar' yang bersumber dari suatu pengertian 'sastra' yang terletak di luar kehidupan sosial, daya jangkauan budaya, dan sejarah manusia. Di atas pandangan dasar ini, timbul perdebatan apa sesungguhnya 'sastra' yang 'benar' itu, dan apa yang bukan 'sastra'.

Jelas, ketiga hal itu bukan tiga persoalan yang terpisah. Sastra dianggap sebagai sesuatu yang mandiri, walau sewaktu-waktu bisa mampir dan masuk dalam masyarakat. Bisa juga menjauh. Sastra dianggap seperti roh leluhur, yang tidak berumah di dalam kehidupan masyarakat di dunia ini. Tetapi bisa diundang — dengan ilham dan kreativitas — dan diwadangkan secara materiil dalam bentuk karya sastra di dunia untuk memberi wejangan dan menyelamatkan manusia dari roh jahat, angkara murka, penindasan penguasa, atau ketidakadilan sosial.

Keadilan sosial

Dengan merajalelanya pandangan dasar yang memuliakan 'sastra' dan 'sastrawan', yang menjadi jelas bukan saja adanya anggapan agar 'sastra' membela keadilan sosial, tetapi juga jelas mengapa tidak ada kecurigaan, apalagi gugatan terhadap 'sastra' sebagai biang keladi ketidakadilan sosial.

Jika dijumpai banyak 'sastra' atau 'sastrawan' yang dianggap tidak baik atau tidak benar, maka diajukan pendapat bahwa mereka itu bukan 'sastra' atau bukan 'sastrawan' dalam arti yang 'sejati'. Sementara pengertian adanya 'sastra' yang 'sejati' tetap dibela dan dipertahankan.

Tidak semua pihak memuji-muji karya sastra Indonesia mutakhir maupun peran sosial sastrawan, kritikus dan guru sastra kita. Tetapi tuduhan paling keras sekali pun yang pernah ditujukan terhadap 'sastra' kita tidak menjangkau 'kelaliman' sastra kita.

Tuduhan paling keras terhadap 'sastra' kita ialah membusu, berpangku tangan, atau menutup mata terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi di sekelilingnya (bukan di bawah injakannya). Seakan-akan 'sastra' tidak lahap menikmati keuntungan dari situasi sosial yang tidak adil itu. Seakan-akan 'sastra' tidak lebih cenderung melestarikan ketidakadilan itu demi kepentingan sendiri. Seakan-akan 'sastra' cuci-tangan dan tak bertanggungjawab atas ketidakadilan tersebut.

Ketidakadilan cenderung dihubungkan dengan pemegang kekuasaan. Sedang 'sastra' dianggap tidak (berminat) memiliki kekuasaan sosial.

Beberapa kasus bisa disebutkan untuk menunjukkan contoh korban kekuasaan sosial sastra kita. Ada banyak karangan dibuat orang, sebagian digelar 'sastra', sebagian tidak bergelar apa-apa. Sebagian disebut 'sastra bernilai sastra', yang lain 'sastra' yang tidak 'bernilai sastra'. Sebagian diterbitkan, sebagian ditolak penerbit. Sebagian dihormati, dianugerahi hadiah, diajarkan di sekolah, sebagian diabaikan begitu saja.

Berbagai istilah mulia diberikan kepada pihak dan kegiatan yang dianggap mengabdikan dan menjunjung 'nilai seni sastra'. Tetapi gelar dan penghormatan tidak diobralkan oleh pemilik kekuasaan dalam lembaga-lembaga 'kesenian' atau 'kesusastraan'. Dana yang tak kecil dipakai dalam berbagai bentuk pengajaran, latihan, pembinaan sastra bukan untuk membuat banyak orang memperoleh harga diri lebih tinggi atau keadilan. Justru sebaliknya, untuk mengokohkan kepercayaan kepada khalayak bahwa mereka 'buta' atau 'awam' sastra. Bahwa mereka perlu diajar (dan membayar ongkos pelajaran) sastra. Sebab ada anggapan lain, 'sastra' membentuk seseorang menjadi 'manusia seutuhnya'. Sementara pelajaran utama sastra kita memuliakan hal-hal yang biasanya tak akan pernah tercapai khalayak umum.

Sastra

Jika kemuliaan suatu karangan atau seseorang ditentukan oleh dekat-jauhnya mereka dari nilai agung 'sastra', wajarlah jika kemudian muncul pertanyaan 'apa sih sastra itu'. Belakangan ini ada seorang tokoh kawakan sastra Indonesia menyatakan bahwa kegiatan bersastra, termasuk kritik dan studi sastra, berpokok pada usaha menjawab pertanyaan 'sastra itu apa'.

Bukannya saya tak pernah terkecoh oleh pertanyaan seperti ini. Tetapi setelah tergelitik oleh beberapa gagasan A.L. Becker dan R.

Williams tentang hubungan bahasa, kekuasaan politik, dan masyarakat, saya berminat menghadapi pertanyaan itu dari sisi lain. Saya kira 'kesalahan' banyak pemikir dan guru sastra yang pernah saya jumpai bukan pada jawaban mereka atas pertanyaan itu. Tetapi pada upaya mencari jawaban bagi pertanyaan yang saya kira 'salah' untuk diajukan.

Pertanyaan seperti itu cocok bagi mereka yang percaya pada pandangan mendasar tentang 'sastra' yang kini masih dominan di Indonesia, seperti telah saya singgung di atas. Pandangan ini mengkhayalkan adanya sebetulnya 'sastra' yang sejati, yang tidak berada di muka bumi ini, yang seperti roh, misteri, ideal, non-materiil, ahistoris, universal. Yang di Indonesia 'kebetulan' disebut 'sastra' dan di Inggris 'kebetulan' disebut *literature*. Bagaikan suatu suara tembakan sama yang di Indonesia disebut 'dor', sedang di masyarakat berbahasa Inggris disebut *bang*.

Dalam pengertian di atas 'sastra' tidak diakui sebagai suatu pengertian yang pada hakikatnya bersifat sementara, dibuat dan diubah oleh masyarakat tertentu untuk kepentingan zamannya. Justru sebaliknya, perubahan makna 'sastra' dan zaman ke zaman dalam suatu masyarakat dianggap sekedar variasi perubahan pandangan masyarakat tersebut terhadap obyek pandangan yang tetap, statis, abadi, universal, atau sejati. Itulah yang diburu orang di Indonesia, juga di masyarakat yang berliterature di negeri asing, dengan senjata berupa pertanyaan: sastra itu apa?

Dengan menyerahkan kepercayaan dan pengakuan bahwa sastra 'sejati', yang menjadi sumber atau induk kehidupan sastra material di dunia, berada di luar kehidupan sosial yang dimanipu-

lasi manusia, maka berbagai tingkatan kasta dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial kesusastraan kita dapat dianggap sebagai 'kehendak dewata' dan bukan siasat manusia belaka.

Pengertian 'sastra' yang kini dominan di Indonesia tidak saja menempatkan sastra kita dalam posisi empuk sebagai biang keladi ketidakadilan sosial. Tetapi juga sebagai korbannya, seperti yang saya sebut di awal tulisan ini. Sebab, walau punya kekuasaan sosial, sastra kita bukan penguasa sosial tertinggi.

Pembicaraan tentang sastra sebagai korban ketidakadilan sering hanya diarahkan pada soal sensor oleh pihak pemerintah. Padahal sastra Indonesia juga telah menjadi korban dalam bentuk lain yang tak kalah beratnya. Yang sering terabaikan, karena tidak menyolok praktek sensor oleh pemerintah. Di bawah ini salah satu contohnya.

Karena terlanjur percaya akan adanya 'sastra' yang universal, para tokoh sastra Indonesia dengan mudah terkecoh untuk mempercayai ketahyulan akan adanya 'sastra dunia', dan 'sastra Indonesia' sebagai salah satu warganya. Mereka pun terkecoh untuk memuliakan lembaga Hadiah Nobel sastra sedunia. Mereka merasa rendah dan sedih, selama belum ada karya sastra Indonesia yang dicalonkan, apalagi memenangkan hadiah tersebut. Mereka percaya ada yang 'kurang' atau 'salah' dalam kesusastraan Indonesia, karena belum adanya pemenang hadiah Nobel di antara karya sastra Indonesia. Padahal 'kesalahan' itu justru terletak pada cita-cita mereka itu sendiri! ***

* Ariel Heryanto adalah dosen Universitas Kristen Satya Wacana yang sedang bertugas belajar di AS.